



Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Elektoral Indonesia



Oleh :

Arief Budiman

Ketua KPU RI

Kamis, 20 Agustus 2020

PERLUDEM



Sekilas Masyarakat Sipil

Definisi dan Konsep

Menurut Stepan (1998), masyarakat sipil merupakan wilayah dimana ia memiliki banyak gerakan sosial dan organisasi profesi yang berjuang membentuk diri mereka melalui *social movement* yang bergerak di ruang-ruang manapun demi menegakkan dan memperjuangkan kepentingannya.

Menurut Alexis de Tocqueville, masyarakat sipil adalah *non-state actor* atau lembaga-lembaga otonom (dari negara) yang mampu mengimbangi kekuasaan Negara & memiliki kepentingan dalam mengawal kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai sebuah gerakan yang bergerak diluar kontrol negara.

Aspek Eksternal

Enabling Environment
(Hubungan Masyarakat Sipil dengan Negara dan Non Negara :

- A. Peran Pemerintah
- B. Peran Masyarakat (Modal Sosial)

Aspek Internal

Kapasitas Organisasi
(Karakter Masyarakat Sipil)

- A. Otonomi
- B. Keswadayaan
- C. Keswasembadaan

Kondisi Aktual dan Peran Masyarakat Sipil

1. Pengawas Terhadap Negara
2. Mediator Partisipasi Masyarakat
3. *Civic Education*

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Sipil



Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Masyarakat Sipil

1

Adanya regulasi pemerintah

- Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Permendagri No 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan

2

Memberikan akses partisipasi dan informasi

- Adanya kebebasan pers
- Pemberian akses informasi publik
- Adanya kebebasan menyuarakan pendapat dalam berdemokrasi
- Adanya ruang dialog/form/diskusi terhadap suatu isu yang diinisiasi pemerintah pusat/daerah

3

Menginisiasi program pemberdayaan

- Pemerintah memiliki peran bagi organisasi masyarakat sipil untuk berkembang melalui program-program hibah/sosial maupun jaringan kemitraan strategis
- Program beasiswa Pendidikan untuk anggota organisasi masyarakat sipil mitra pemerintah

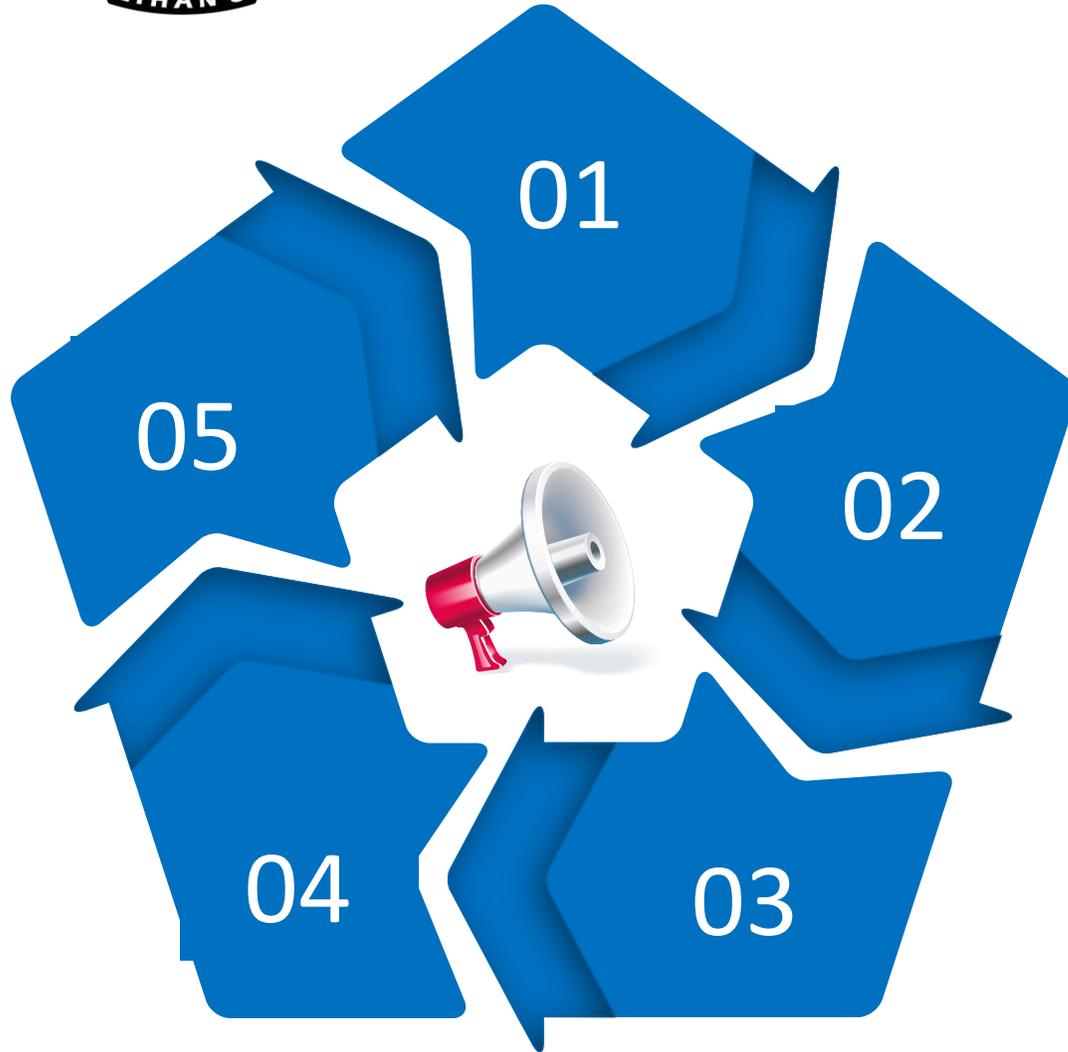
4

Ketersediaan Sumber Pendanaan

- Adanya alokasi dana dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemda dalam bentuk hibah untuk mendukung organisasi masyarakat
- Adanya kemitraan dengan LSM/organisasi masyarakat



Peran Modal Sosial Dalam Kehidupan Demokrasi



01

Wadah integrasi sosial untuk memecahkan masalah-masalah bersama

02

Meningkatkan level partisipasi politik menjadi partisipasi pemilih (tindakan nyata)

03

Mengurangi ongkos mendapatkan informasi politik untuk memutuskan apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, maupun siapa kandidat yang hendak mereka pilih

04

Mendorong seseorang melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara dalam konteks pemilu dengan memberikan suara (voting)

05

Menjaga & Melaksanakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat

Peran dan Fungsi Utama Masyarakat Sipil Dalam Demokrasi



Advokasi

Masyarakat sipil harus berperan memengaruhi kebijakan publik dengan menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung salah satunya adalah DPR.



Empowerment

Masyarakat sipil harus berperan aktif memberdayakan masyarakat (*empowerment*) dalam proses demokrasi melalui forum diskusi/ workshop dll untuk saling bertukar ide, pemikiran dan informasi



Social Control

Masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Fungsi ini dilakukan media massa, LSM, NGO, Organisasi Masyarakat Sipil secara terorganisir



Ciri-Ciri Organisasi Masyarakat Sipil

Menurut Diamond (1999), Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi yang berada di luar negara, bersifat bebas dan independen yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :



Bersifat Ekonomis

Organisasi memiliki jaringan produktif dan komersial

Bersifat Kultural

Institusi & organisasi religius, etnis, komunal dan asosiasi lainnya yang mempertahankan hak-hak, nilai-nilai, keyakinan & simbol kolektif

Bersifat Informatif & Edukatif

Organisasi yang memiliki gerak pada produksi dan diseminasi pengetahuan (baik untuk tujuan profit/tidak), ide, berita dan informasi publik.

Berkaitan dengan Kepentingan

Kelompok yang berupaya memajukan atau mempertahankan kepentingan fungsional Bersama para anggota seperti serikat buruh, kelompok professional dll

Berkaitan dengan pembangunan

Organisasi yang mengumpulkan sumberdaya, bakat individu untuk perbaikan infrastruktur, kelembagaan dan kualitas kehidupan komunitas (Asosiasi Profesi)

Berorientasi Isu

Gerakan untuk perlindungan lingkungan, reformasi agraria, perlindungan konsumen, hak-hak perempuan, etnis minoritas, kelompok adat, difabel dan korban diskriminasi penyalahgunaan kekuasaan

Berorientasi Civic

Kelompok-kelompok non partisan yang berupaya memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis seperti kelompok yang bekerja untuk HAM, Pendidikan dan mobilisasi pemilih, pemantauan pemilu, pengungkapan praktek korupsi

Berhubungan dengan ideologi, aliran informasi dan ide-ide kritis

Mencakup kelompok yang mengevaluasi dan mengkritisi negara seperti media massa independen, aktivitas kultural dan intelektual yang otonom seperti organisasi mahasiswa, dll



Kehadiran Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Protes masyarakat sipil melawan Soekarno sebagai presiden seumur hidup di era demokrasi terpimpin. Tetapi gagasan tersebut tidak terimplementasi hingga akhirnya orde lama runtuh.

Masyarakat sipil mendorong perubahan kebijakan ditandai pula oleh hadirnya beberapa lembaga negara baru, seperti Kementerian PPPA, KPK, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Informasi, Komnas Perempuan dan Anak dll, hingga UU tentang Pemilu, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dll

Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil yang terdaftar di Indonesiabertjumlah **431.465 ormas (Data Kemendagri, Per 11 November 2019)**

- 226.994 ormas berbadan hukum berbentuk Yayasan terdaftar di Kemenkumham
- 167.385 ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan terdaftar di Kemenkumham
- 27.015 ormas berdasarkan surat keterangan terdaftar (SKT) di Kemendagri
- 71 ormas terdaftar di Kemenlu

1966
Orde Baru Dimulai

2002,
KPK Berdiri

2019

Data Ormas di Indonesia

1998
Reformasi

2004,
Pemilu Presiden Secara
Langsung Pertama

Mendukung Pemilu dilaksanakan 6 kali sejak 1966, Gerakan protes melawan otoriterisme Presiden Soeharto dengan tumbang rezim Orde Baru setelah 32 tahun memimpin

Pada 2004, dipilihlah Pemilihan Presiden Langsung pertama yang didukung masyarakat sipil sebagai *actor non-state* yang sekarang mereka telah berafisiasi ke lembaga-lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non Government Organization (NGO).

Di era reformasi, masyarakat sipil gencar dalam menyusun sebuah gerakan aksi, demonstrasi dan kesolidan menjadi satu kekuatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai kontrol sosial bagi pemerintahan yang berkuasa dan juga Lembaga legislatif penyusun UU



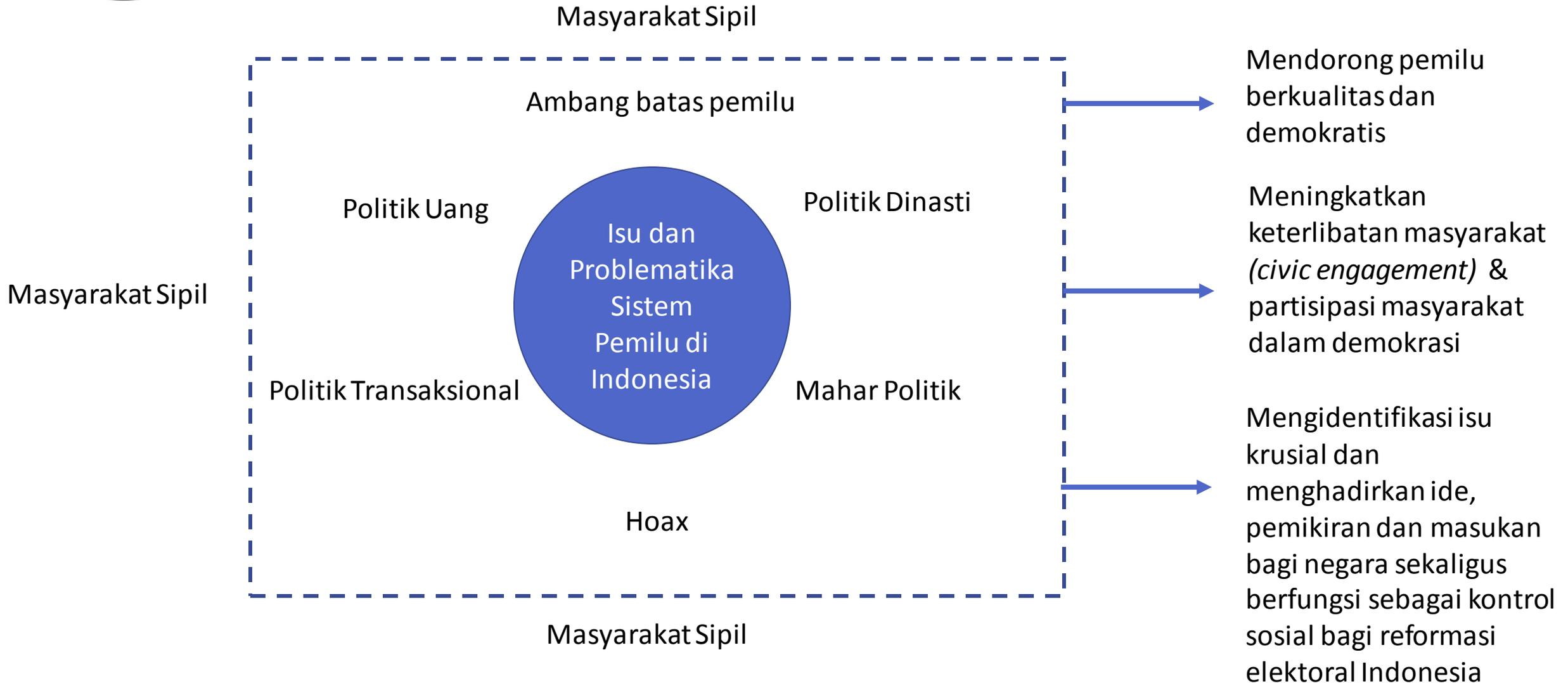
Peran Perludem Sebagai Mitra Strategis KPU





Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Elektoral Indonesia

Isu dan Problematika





Suksesi dan Penutup

- Indonesia adalah negara demokrasi yang mengusung arus musyawarah mufakat, termasuk menjangking aspirasi dari masyarakat sipil. Maka selama masyarakat sipil masih kuat dalam mengawal demokrasi, diyakini pengaruhnya akan semakin optimal. Organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
- Suksesi pada Perludem harus dimaknai sebagai proses untuk memperkuat perkembangan organisasi agar semakin berkualitas dan mempertahankan raihan prestasi yang sudah dicapai seperti Ormas Terbaik tahun 2019 untuk bidang tata kelola pemerintahan dari Kemendagri
- KPU RI memandang Perludem sebagai mitra strategis dalam bidang kepemiluan di Indonesia yang saling bersinergi untuk membangun iklim demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik





www.kpu.go.id  KPU Republik Indonesia  @kpu_ri  @KPU_ID  KPU RI

Terima Kasih



PEMILIHAN
SERENTAK



#KPU
LAWAN
COVID19

